



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : UND-93/NK.02.00/02/2024 Jakarta, 05 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Webinar**

Yth.,
**Sekretaris Menteri/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama
c.q Kepala Biro yang menangani Kepegawaian/SDM
Kementerian/Lembaga
(Daftar Terlampir)
di
Tempat**

Dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara akan melaksanakan webinar netralitas ASN dengan tema **“Pemilu Semakin Dekat - Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat?”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan dimaksud sebagai peserta pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : *Zoom Meeting Platform*
Meeting ID: 820 6263 3460
Passcode: ASNNETRAL

Agenda : Terlampir

Mengingat kegiatan ini merupakan bentuk membangun kesadaran (*awareness*) tentang pentingnya menegakkan netralitas ASN, kami mengharapkan Saudara turut menghimbau para pejabat dan pegawai di lingkungan instansi Saudara untuk mengikuti webinar ini.

Dikarenakan kapasitas zoom meeting yang terbatas pada seribu peserta virtual, apabila ruang virtual sudah memenuhi batas peserta maka Webinar di atas juga dapat diakses melalui kanal Youtube KASN RI dengan tautan <https://www.youtube.com/c/KASNRI>. Untuk Informasi lebih lanjut, KASN menunjuk narahubung masing-masing sebagaimana terlampir.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

^

Agus Pramusinto

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

Lampiran I
Nomor : UND-93/NK.02.00/02/2024
Tanggal : 05 Februari 2024

SUSUNAN ACARA
WEBINAR NETRALITAS ASN
“Pemilu Semakin Dekat - Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat?”
6 FEBRUARI 2024

NO.	WAKTU (WIB)	Durasi	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.30 – 09.00	30’	Registrasi Peserta dan Pra Acara	Panitia
2.	09.00 – 09.05	5’	Pembukaan	MC
3.	09.05 – 09.10	5’	Lagu Indonesia Raya	Panitia
4.	09.10 – 09.15	5’	Pembacaan Doa	Panitia
5.	09.15 – 09.20	5’	Penayangan Video Reportase	Panitia
6.	09.20 – 09.35	15’	<i>Keynote Speech:</i> “Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu dan Pemilihan 2024”	Ketua KASN
7.	09.35 – 09.40	5’	Pengantar dan Pembacaan CV Narasumber	Moderator
8.	09.40 – 10.10	30’	Penyampaian Materi: “Pengawasan netralitas ASN oleh <i>civil society</i> ”	Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua Jaga Pemilu)
9.	10.10 – 10.40	30’	Penyampaian Materi “Pengawasan terhadap ASN penyelenggara Pemilu”	Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
10.	10.40 – 11.10	30’	Penyampaian Materi “Independensi lembaga negara dalam mengawasi netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu”	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Ahli Hukum Tata Negara)
11.	11.10 – 11.45	35’	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.	11.45-11.50	5	Menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”	Panitia
13.	11.50 – 11.55	5’	Penutupan	MC

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

Lampiran II

Nomor : UND-93/NK.02.00/02/2024

Tanggal : 05 Februari 2024

DAFTAR UNDANGAN & NARAHUBUNG

1. Wilayah I

Narahubung : Sdr. Dony Halomoan (0896-3795-3487)

No	Instansi
1.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.	Kementerian Agama
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4.	Kementerian Kesehatan
5.	Kementerian <i>Pemberdayaan Perempuan</i> dan Perlindungan Anak
6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
7.	Kementerian Sosial
8.	Kementerian Pemuda & Olahraga
9.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
10.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
11.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
12.	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)
13.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
14.	Badan Intelijen Negara (BIN)
15.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
16.	Badan Amil Zakat Nasional
17.	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
18.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
19.	Dewan Insinyur Indonesia
20.	Dewan Jaminan Sosial Nasional
21.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
22.	Komite Akreditasi Nasional
23.	Konsil Kedokteran Indonesia
24.	Konsil Keperawatan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

25.	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
26.	Lembaga Sensor Film (LSI)
27.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
28.	Ombudsman RI (ORI)
29.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
30.	Mahkamah Agung (MA)
31.	Televisi Republik Indonesia (TVRI)
32.	Radio Republik Indonesia (RRI)

2. Wilayah II

Narahubung : Sdr. Muhammad Dewantara Latippa (0813-2097-6232)

No	Instansi
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Kementerian Luar Negeri
4.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7.	Kementerian Pertahanan
8.	Kementerian Sekretariat Negara
9.	Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
10.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11.	Badan Narkotika Nasional (BNN)
12.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
13.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
14.	Badan Pusat Statistik (BPS)
15.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
16.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
17.	Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
18.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
19.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
20.	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
21.	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
22.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPU)
23.	Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
24.	Dewan Pers

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

25.	Dewan Pertahanan Nasional
26.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
27.	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
28.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
29.	Kantor Staf Presiden (KSP)
30.	Komisi Banding Merek
31.	Komisi Banding Paten
32.	Komisi Informasi Pusat
33.	Komisi Kejaksaan
34.	Komisi Kepolisian Nasional
35.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnashAM)
36.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
37.	Komite Kebijakan Industri Pertahanan
38.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
39.	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
40.	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
41.	Mahkamah Konstitusi (MK)
42.	Badan Pembinaan Ideologi
43.	Pancasila (BPIP)
44.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)

3. Wilayah III

Narahubung : Sdr. Randi Putra (0852-1427-3639)

No	Instansi
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4.	Kementerian Keuangan
5.	Kementerian Koperasi dan UKM
6.	Kementerian Perdagangan
7.	Kementerian Perindustrian
8.	Kementerian Pertanian
9.	Kementerian Ketenagakerjaan
10.	Kejaksaan Agung
11.	Badan Informasi Geospasial (BIG)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

12.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
13.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
14.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
15.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
16.	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
17.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
18.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
19.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
20.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
21.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
22.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
23.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
24.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
25.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
26.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
27.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/Dewan Kawasan Sabang
28.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
29.	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
30.	Dewan Pengupahan Nasional
31.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
32.	Komisi Penyuluhan Nasional
33.	Komite Anti-Dumping Indonesia
34.	Komite Ekonomi dan Industri Nasional
35.	Komite Industri Nasional
36.	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
37.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
38.	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
39.	Komite Perdagangan Nasional
40.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
41.	Komite Profesi Akuntan Publik
42.	Lembaga Kerja Sama Tripartit

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

43.	Lembaga Produktivitas Nasional
44.	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
45.	Otoritas Nasional Senjata Kimia
46.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
47.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
48.	Sekretariat Kabinet
49.	Badan Pangan Nasional

4. Wilayah IV

Narahubung : Sdri. Hardiyanti Nurul Sakinah (0811-3111-515)

No	Instansi
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2.	Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Kementerian Perhubungan
5.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
6.	Kementerian Investasi
7.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
10.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
11.	Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba
12.	Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
13.	Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
14.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
15.	Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
16.	Badan Restorasi Gambut dan Mangrov
17.	Dewan Energi Nasional
18.	Dewan Sumber Daya Air Nasional
19.	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
20.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
21.	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
22.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
23.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
24.	Komite Akreditasi Nasional

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

25.	Komite Nasional Keamanan Penerbangan
26.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
27.	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
28.	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
29.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
30.	Komisi Yudisial (KY)
31.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
32.	Kepolisian RI (Polri)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.